

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor merupakan badan yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2019 diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Pengembangan Data dan Informasi Daerah, Program Perencanaan Sosial Budaya, Program Penelitian Pengembangan, dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2019.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  - 11) Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;  
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 12) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  - 13) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
  - 14) Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Seri D);
  - 15) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019;
  - 16) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  - 17) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.340 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja Beppeda Kota Bogor selama Tahun 2019 berupa penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 berupa rencana kinerja yang mencakup rencana capaian kinerja Tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN
  - 1.1    Latar Belakang
  - 1.2    Landasan Hukum
  - 1.3    Maksud dan Tujuan
  - 1.4    Sistematika Penulisan
- BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
  - 2.1    Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016 dan capaian Renstra SKPD
  - 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,
  - 2.3    Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
  - 3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,
  - 3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda,
  - 3.3    Program dan Kegiatan.
- BAB IV     PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2017**

#### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017 dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor**

Bappeda Kota Bogor sebagai badan perencanaan, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan warga kota.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor pada Tahun 2017 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

Program - program yang dilaksanakan Bappeda Kota Bogor sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Kerjasama Pembangunan Daerah
5. Program Pengembangan Data dan Informasi
6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
8. Program Perencanaan Tata Ruang
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
12. Program Penelitian dan Pengembangan
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14. Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda**

Bappeda Kota Bogor pada tahun 2016 telah melaksanakan 14 (empatbelas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

### **A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

#### **1. Pengelolaan Rumah Tangga OPD**

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pada Bappeda Kota Bogor, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas rutinitas, kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 850.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 821.719.896,- (96,67%).

### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur**

Program ini memiliki peran dalam upaya mewujudkan tata kelola sarana prasarana aparatur yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah :

#### **1. Pengadaan Inventaris Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpenuhinya sarana dan prasarana Inventaris Kantor di lingkungan Bappeda Kota Bogor, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas rutinitas, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 879.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 819.967.244,- (93,27%),

#### **2. Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor**

Bertujuan untuk ini Terpeliharanya sarana dan prasarana Inventaris Kantor di lingkungan Bappeda Kota Bogor, kegiatan dimaksud dianggarkan Kegiatan sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 912.158.644,- (96,02%).

## **C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan :

### **1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD**

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD dilaksanakan selama dua triwulan atau 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret dan Oktober sampai dengan Desember 2017. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.43.403.975,- .

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusun dokumen Rencana Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen
- 2) Tersusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen
- 3) Tersusun dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Bappeda Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen
- 4) Tersusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tersedia dokumen perencanaan dan Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogor

## **C. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Indikator kinerja program ini berupa tingkat penyusunan dokumen penelitian pengembangan yang pada tahun 2017 dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

### **1. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)**

Kegiatan ini merupakan amanah dari Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dengan biaya sebesar Rp.400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.351.622.533,-.Kegiatan dilakukan secara bertahap dari 68 Kelurahan yang ada, 52 kelurahan mengikuti/mengirim proposal tahap seleksi,seleksi terakhir dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 di Bappeda Kota Bogor. Peserta Lomba adalah warga/masyarakat tingkat RT dan

RW, sebagai juaranya: Juara 1 Kampung Tematik Agro Edu Wisata Organik Kelurahan Mulyaharja, Juara 2 Kampung Tematik Ekowisata dan Bisnis Kelurahan Margajaya, Juara 3 Kampung Tematik Jawara Kelurahan Katulampa. Adapun hadiah/uang Pembinaan Juara 1 Rp. 50.000.000,-, juara 2 Rp. 30.000.000,-. Juara 3 Rp. 20.000.000,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

Terselenggaranya Lomba Inovasi Rancang Kampung Tematik, Tersusunnya dokumen Direktori Inovasi Daerah Kota Bogor sebanyak 40 buku.

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Teridentifikasinya potensi wilayah yang layak untuk dikembangkan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan di tahun mendatang.
- 2) Teridentifikasinya Hasil-hasil penelitian, pengembangan dan Inovasi yang ke depan dapat diaplikasikan untuk Kota Bogor.

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Masyarakat wilayah belum bisa membaca potensi wilayahnya untuk dikembangkan dan diajukan dalam kegiatan lomba.
- 2) Tim pendamping belum optimal mendampingi masyarakat wilayah dalam menyusun objek lomba sehubungan mereka di minta membantu secara sukarela.
- 3) Belum semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melakukan inovasi yang telah dilakukannya.
- 4) Belum adanya kerjasama antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan lembaga penelitian dan pengembangan di Kota Bogor dalam hal menciptakan produk-produk inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

## **2. Kajian Aktual Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Rakyat Berbasis Daya Saing**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 270.837.998,-



Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen Kajian Aktual Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Rakyat Berbasis Daya Saing dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Kebutuhan pasar di Kota Bogor, berdasarkan jumlah ketersediaan eksisting pasar di Kota Bogor, yaitu 12 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Pakuan Jaya, sudah mencukupi, tetapi dari segi fisik/fungsi bangunan dan fasilitas perlu direvitalisasi, sedangkan dari sudut pandang fungsi pasar perlu ditingkatkan menjadi pasar berskala regional yaitu Pasar Kebon Kembang, Pasar Jambu Dua dan Pasar Induk Kemang.
  - b. Dibutuhkan 2 pasar rakyat baru tingkat wilayah pengembangan dan sub wp, yaitu di sub WP C1 di kawasan sekitar Kemang dengan fungsi sebagai pasar lingkungan dan diarahkan untuk menyediakan komoditas basah dan fashion, dan sub WP E1 di kawasan sekitar Katulampa dengan arahan penyediaan komoditas sembako
- 2) Dalam rangka mendukung rencana penataan Kawasan Suryakencana, berkenaan dengan penataan Pasar Bogor dan Plaza Bogor :
  - a. Pasar Bogor dan Plaza Bogor direncanakan direduksi fungsi pasarnya dan dialihkan ke Pasar Jambu Dua dan Pasar Sukasari
  - b. Pasar Jambu Dua perlu disiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi pasar regional dan sekaligus menjadi pusat komoditas pangan WP D.
  - c. Pasar Sukasari memerlukan revitalisasi total karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak sebagai pasar rakyat yang harus memenuhi SNI. Pasar ini masuk ke dalam pasar tipe D dan melayani sebagian wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan sebagian wilayah Bogor Timur.
- 3) Terkait dengan aspek manajemen pasar :
  - a. Perlu perbaikan Business Plan PD Pasar Pakuan Jaya yang secara de jure mengelola 12 unit pasar rakyat di Kota Bogor
  - b. Peningkatan kemampuan manajerial pengelolaan pasar

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :Meningkatnya daya saing pasar rakyat

## D. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA

### 1. Review Masterplan Drainase

Pada Tahun 2007 sudah dilakukan kegiatan penyusunan Masterplan Drainase yang berisikan 15 Zona dari sungai dan anak sungai, kemudian pada Tahun 2013 dilakukan outline plan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor yang menghasilkan beberapa penjelasan detail mengenai penanganan banjir dan pembangunan saluran drainase. Lalu pada tahun 2014 dilakukan Review Masterplan Drainase pada Bappeda Kota Bogor dan menghasilkan dokumen hingga laporan pendahuluan, sehingga perlu dilanjutkan dalam Review Masterplan Drainase pada Tahun 2016 lanjutan, yang kemudian Tahun 2017 ada lanjutan. Dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi Rp.484.438.150,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pada Tahun 2017, Masterplan Drainase dilaksanakan kembali dengan cakupan studi hanya 6 Zona terdiri dari :
- 2) Zona 6, 7 dan 8 yang meliputi : Wilayah Kecamatan Bogor Timur, sebagian kecamatan Bogor Tengah dan sebagian Kecamatan Bogor Utara
- 3) Zona 9, 10 dan 11 yang meliputi : Wilayah Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Utara Ke 6 (enam) Zona ini merupakan DAS Ciliwung



Outcome kegiatan ini sebagai berikut :Dokumen Masterplan Drainase 6 Zona TA.2017(Identifikasi rawan genangan/banjir dan Pengembangan Eco Drain)

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya koordinasi dengan tim teknis berupa survey ke lapangan secara bersama-sama terhadap titik rawan genangan dan banjir.
- 2) Zona yang belum ditangani adalah : Zona 1, 2, 3, 4 dan 5, yang merupakan zona DAS Cisadane (wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat) dan kami berencana akan melaksanakan kembali di Tahun 2018.

## 2. Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Kegiatan ini bertujuan meningkatnya kepedulian baik pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan yang memperhatikan perubahan iklim atau pembangunan kota rendah emisi dan terfasilitasinya kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim dari berbagai sumber pendanaan ke Kota Bogor. Pada Tahun 2017, dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi Rp.145.624.718,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Prosiding Pembahasan Perencanaan Kota Rendah Emisi, hasil fasilitasi kegiatan bantuan luar negeri yakni NIES Jepang dan ICLEI
- 2) Fasilitasi Kegiatan Bantuan IPB-NIES Jepang : Pengumpulan data dan survey sensor energy dan transportasi untuk rencana pengembangan Eco City di Kota Bogor

- 3) Fasilitasi Kegiatan Bantuan ICLEI : Pengumpulan data untuk Pengisian Laporan cCr ( The Carbonn® Climate Registry, adalah platform pelaporan global terkemuka untuk kota yang menangani perubahan iklim. Hal ini membantu pemerintah



daerah untuk melacak dan melaporkan target, tindakan dan kinerjanya. Platform ini memungkinkan pertukaran, pembelajaran dan benchmarking di antara 950+ entitas terdaftar sambil memberikan data yang masuk ke dalam negosiasi iklim global melalui ICLEI sebagai focal point untuk konstituensi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota.

Meningkatnya kualitas lingkungan dan pengembangan strategi pembangunan kota rendah emisi

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas lingkungan dan pengembangan strategi pembangunan kota rendah emisi

### **3. Penyelenggaraan Perencanaan Sarana Prasarana Kota**

Kegiatan fasilitasi koordinasi perencanaan sarana dan prasarana kota bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi perencanaan sarana dan prasarana kota yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat kelompok kerja (pokja) sanitasi, pokja perumahan dan permukiman, pokja transportasi, pokja RPIJM Kota Bogor serta penyelenggaraan sanitasi award. Dengan anggaran sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 336.469.889,-

Adapun output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Pokja Sanitasi
- 2) Penyelenggaraan sanitasi award, penilaian terhadap 44 KSM Sanitasi di Kota Bogor dengan daftat pemenang:
  1. KSM Bunga Indah Kelurahan Sindangsari Juara I
  2. KSM Cilibende Kelurahan Babakan Juara II
  3. KSM Baiturrohman Kelurahan Mekarwangi Juara III
  4. KSM Mawar Bodas Kelurahan Sindangrasa Juara Harapan I
  5. KSM Nurul Yaqin Kelurahan Kedung Waringin Juara Harapan II
  6. KSM Rosella Kelurahan Pamoyanan Juara Harapan III
- 3) Fasilitasi Pokja PKP yaitu dengan updating data kawasan kumuh, updating data RTLH Kota Bogor dan mengkoordinasikan penanganan kawasan kumuh perkotaan
- 4) Fasilitasi Pokja RPIJM yaitu dengan updating data RPIJM, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang cipta karya.

Adapun outcome kegiatannya adalah masyarakat dapat mengelola secara mandiri fasilitasi SANIMAS secara bergotong royong sehingga terjadi peningkatan pemberdayaan masyarakat di sektor sanitasi, Meningkatkan kualitas perencanaan dan data sektor PKP, Sanitasi dan Infrastruktur lainnya.

## **E. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan telah dicapai dengan baik melalui pelaksanaan musrenbang, penyusunan rencana pembangunan tahunan,

penyusunan kebijakan umum pemerintah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

### **1. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2017**

Kegiatan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana setiap pemerintah daerah dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di wilayahnya mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan harapan bahwa pembangunan yang telah direncanakan tepat sasaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek. Dengan anggaran sebesar Rp. 513.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 495.968.499,-

Output Kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Monitoring Musrenbang Tk Kelurahan di 68 Kelurahan
- 2) Melaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan di 6 Kecamatan
- 3) Melaksanakan Forum OPD yang dibagi kedalam 4 bidang yaitu bidang Pemerintahan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Bidang Fisik
- 4) Melaksanakan Musrenbang Tingkat Kota
- 5) Mengikuti pelaksanaan Musrenbang Tingkat Propinsi
- 6) Berpartisipasi dalam acara helaran pembangunan di Botani square dalam mendukung evaluasi 3 tahun kinerja Walikota

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya dokumen Usulan Hasil Musrenbang Tk Kelurahan yang menjadi prioritas yang telah diinput kedalam SIMRAL sebagai bahan usulan Musrenbang Tk Kecamatan
- 2) Tersusunnya dokumen Usulan Hasil Musrenbang Tk Kecamatan yang menjadi prioritas yang telah diinput



kedalam SIMRAL sebagai bahan Pembahasan pada Forum OPD

- 3) Tersusunnya dokumen Usulan Hasil Kesepakatan pada Forum OPD yang telah mensinkronkan antara usulan OPD dengan usulan Musrenbang Tk Kecamatan menjadi prioritas sebagai bahan Musrenbang Tk Kota
- 4) Tersusunnya dokumen Usulan Rencana (UR) kegiatan sebagai bahan penyusunan matrik RKPD Tahun 2018 dan pemberian penghargaan bagi Kelurahan dan Kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang yang diberikan kepada Kec. Bogor Barat, Kel. Pasir Jaya, Kel. Kedung Badak dan Kel. Tanah Baru
- 5) Terakomodirnya usulan Pemerintah Kota Bogor yang diajukan melalui RKPD online sebagai bahan penyusunan RKPD Propinsi Jawa Barat
- 6) Terpamerkannya kinerja Pemerintah Kota Bogor melalui foto-foto yang dikemas dalam bentuk maket-maket. Terpamerkannya kinerja Pemerintah Kota Bogor melalui foto-foto yang dikemas dalam bentuk maket-maket

## 2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's dan Evaluasi IPM

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bahan Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs dan Evaluasi IPM pada tahun 2017. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.74.295.775,-

Output Kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Menyusun RAD SDGs Kota Bogor
- 2) Menyusun Laporan IPM Kota Bogor

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tersusunnya RAD SDGs Kota Bogor dan Evaluasi IPM Kota Bogor berupa Studi Pemetaan Indikator Global, Indikator Nasional dan Indikator Daerah (RPJMD dan Revisinya) sehingga diperoleh daftar indikator yang sudah ada, dapat dikembangkan dan yang belum ada dalam RPJMD Kota Bogor sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Aksi Daerahnya. Kegiatan ini juga menghasilkan evaluasi atas IPM Kota Bogor dilihat dari indikator kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dimana indikator pendidikan





dan kesejahteraan merupakan 2 indikator IPM yang lebih kecil dibandingkan indeks kesehatan, sehingga fokus perencanaan pembangunan agar lebih mengoptimalkan sektor kesehatan dan peningkatan penghasilan penduduk Kota Bogor.

### **3. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2018**

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, serta diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 241.764.162,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 (kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan) sebanyak 1 (satu) dokumen KUA
- 2) Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 sebanyak 1 (satu) dokumen PPAS
- 3) Tersusunnya dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 (kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan) sebanyak 300 buku
- 4) Tersusunnya dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 sebanyak 300 buku

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah
- 2) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun RKA-SKPD dan Rencana APBD Tahun 2018
- 3) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang aplikatif dan aspiratif

### **5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2017**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pembahasan KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan pembahasan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017. Dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 175.291.972,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 (kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan) sebanyak 1 (satu) dokumen KUPA
- 2) Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 (satu) dokumen PPAS
- 3) Tersusunnya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 (kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan) sebanyak 300 buku
- 4) Tersusunnya dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 300 buku

Outcome kegiatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah
- 2) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun RKA Perubahan –SKPD dan Rencana APBD Perubahan Tahun 2017
- 3) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang aplikatif dan aspiratif

## **6. Pengkajian RKA SKPD T.A 2018**

Kegiatan pengkajian RKA 2017 merupakan tindak lanjut dari dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017. Dengan anggaran sebesar Rp.296.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.242.994.628,-

Kegiatan pengkajian RKA 2017 menunjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD. Kegiatan ini ditujukan agar seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan sasaran, tujuan dan target kinerja berdasarkan KUA, dan PPAS 2017. Tahapan kegiatan pengkajian RKA 2017 sebagai berikut:

1. Pembahasan dokumen Pra RKA-SKPD 2017 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi bahan untuk penyusunan



Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

2. Pelaksanaan asistensi Pengkajian Terhadap Usulan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
3. Mengkaji dan membahas kesesuaian program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta melaksanakan Rekapitulasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebagai bahan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Asistensi RKA-SKPD 2017 sesuai Surat Perintah Walikota Bogor.

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Dokumen Pra RKA seluruh SKPD Tahun Anggaran 2017;
- 2) Dokumen hasil asistensi RKA seluruh SKPD Tahun Anggaran 2017;
- 3) Bahan penyusunan RAPBD 2018.

## **7. Pengkajian RKA SKPD dan DPPA SKPD T.A 2017**

Kegiatan pengkajian RKA Perubahan 2017 merupakan tindak lanjut dari dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan pengkajian RKA Perubahan 2017 menunjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD. Tujuan Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyesuaikan APBD murni 2017 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang dibahas bersama antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Pengkajian dilakukan apabila selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran.

Penyusunan Dokumen Perencanaan RAPBD Perubahan Tahun 2017 dilakukan melalui proses asistensi RKA SKPD Perubahan Tahun 2017. Tujuannya agar kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan sasaran, tujuan dan target serta sesuai dengan RKPD Perubahan, KUPA dan PPAP. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Asistensi RKA-SKPD 2017 sesuai Surat Perintah Walikota Bogor. Dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 152.599.110,-

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Dokumen hasil asistensi RKA Perubahan seluruh SKPD tahun anggaran 2017;
- 2) Bahan penyusunan RAPBDP 2018.

## **8. Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja**

RKPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan Anggaran sebesar Rp.375.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.360.716.175,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
- 2) Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018
- 3) Tersusunnya Perwali tentang RKPD Tahun 2018
- 4) Tersusunnya Pengesahan Renja OPD Tahun 2018
- 5) Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2017
- 6) Tersusunnya Perwali tentang RKPD Perubahan Tahun 2017
- 7) Peningkatan wawasan dalam rangka Penyusunan RKPD

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Adanya Dokumen Rancangan Awal RKPD yang memuat dasar hukum penyusunan dan Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2018

- 2) Adanya Dokumen Rancangan Akhir RKPD yang memuat dasar hukum penyusunan dan Sistematika serta dilengkapi dengan Matrik Usulan Perangkat daerah yang telah disinkronkan dengan Usulan Musrenbang
- 3) Terbitnya Perwali Nomor 32 Tahun 2017, tanggal 31 Mei 2017 tentang RKPD Tahun 2018, yang telah disandingkan dengan data SIMRAL telah disosialisasikan pada tanggal 21 Juli 2017 kepada seluruh OPD sebagai bahan penyempurnaan Renja OPD serta penyusunan KUA/PPAS Tahun 2018
- 4) Terbitnya Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-212 Tahun 2017, tanggal 15 Juni 2017, tentang Pengesahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018, sebagai bahan acuan bagi OPD dalam perencanaan Tahun 2018
- 5) Adanya dokumen Rancangan Akhir RKPD Perubahan yang memuat dasar hukum dan sistematika penyusunan serta Matrik Perubahan RKPD Tahun 2017
- 6) Terbitnya Perwali Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 31 Juli 2017, sebagai bahan acuan bagi Perangkat Daerah dalam perubahan anggaran tahun 2017
- 7) Adanya gambaran kiat-kiat keberhasilan Pemerintah Kota Muara Enim dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sehingga Kota tersebut secara berturut-turut mendapat penghargaan dari Propinsi maupun Nasional`



## 9. Perencanaan Umum

Kegiatan perencanaan umum meliputi beberapa penyelenggaraan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat. Kegiatan ini merupakan forum untuk mendiskusikan dan mencari solusi pemecahan atas berbagai permasalahan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah, serta sebagai salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan

pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.435.474.899,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi serta memenuhi undangan dari pihak Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta maupun provinsi luar pulau jawa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang perencanaan selama 12 bulan.
- 2) Memfasilitasi penyusunan tugas khusus yang tidak terakomodir dalam kegiatan ini

Output kegiatan ini sebagai berikut :Meningkatnya kualitas perencanaan dan sinergitas perencanaan pembangunan antara kabupaten/kota dengan Provinsi Jawa Barat,

#### 10. Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan

Kegiatan inidengan anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.605.478.900,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pada Bulan Januari-Oktober 2017, tim TP4 menjalankan tugasnya dalam mengawal pelaksanaan enam prioritas pembangunan. Dalam kurun tersebut, Tim TP4 fokus pada Penataan Transportasi dan Angkutan Umum, Penataan Pelayanan persampahan dan Kebersihan Kota, Penataan Ruang Publik, Pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota, Koordinasi yang dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait isu-isu dalam prioritas pembangunan.
- 2) Dalam bulan Oktober difokuskan pada percepatan program kegiatan pembangunan sektor pendanaan lain APBD dalam mencari inovasi sumber dana dari non APBD/swasta dengan dilaksanakan workshop pembiayaan pembangunan Non APBD.



- 3) Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan percepatan prioritas pembangunan

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen Laporan Triwulan 1s/d 4 2017
- 2) Memberikan rekomendasi tentang inovasi cara solusi dan ide-ide dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan kepada para pimpinan perangkat daerah dalam mempercepat pembangunan kota

## **11. Revisi RPJMD Kota Bogor 2015 – 2019**

Kegiatan ini dengan anggaran Rp 300.000.000 dan realisasi Rp 288.017.220. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bogor No.6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, merupakan penjabaran visi misi dan program walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan daerah dengan RPJPD dan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunsn daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Sebelum adanya revisi RPJMD tahun 2014 – 2019, pernah pula dilakukan penyempurnaan yang ditetapkan dengan peraturan walikota No.78 tahun 2015 tentang capaian kinerja tahunan dalam lampiran VII kebijakan umum dan program pembangunan daerahPerda Kota Bogor No.6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor tahun 2015 – 2019. Dalam Perwali tersebut, target kinerja untuk masing masing sasaran dirinci menjadi target kinerja tahunan tetapi tidak mengubah pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah.

Materi muatan RPJMD diharuskan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan daerah serta perkembangan kebijakan Nasional. Maka RPJMD Kota Bogor perlu menyesuaikan dengan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 disamping harus menyesuaikan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Serta rekomendasi dari

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Surat No : B/167/AA.05/2017) tentang hasil evaluasi oleh Tim IKU dan LAKIP Kota Bogor. Rekomendasi tersebut antara lain :

- Agar Bappeda memastikan tersedianya RPJMD dan rencana strategis SKPD yang lebih selaras, berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur, layahn untuk diperjanjikan dan dapat dketahui dan dimonitor hasilnya saat dibutuhkan
- Kepada seluruh pimpinan SKPD agar memastikan tersedianya alat ukur yang menggambarkan keberhasilan kinerja pencapaian kinerja utama (IKU) setiap SKPD yang dipimpinya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dank has atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan SKPD tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
- Kepada sekretaris daerah dan kelapa Bappeda agar memastikan diterapkannya anggaran berbasis kinerja dengan cara meminta seluruh SKPD mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh SKPD dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya).
- Kepala Bappeda agar melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program program prioritas atau unggulan yang ada di Kota Bogor. Bappeda harus memastikan keberhasilan maupun kurang berhasil suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target group (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan di akhir periode RPJMD Pemerintah Kota Bogor.

Rangkaian proses penyusunan perubahan RPJMD Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 :

- a. Rapat internal Bappeda membahas rencana kerja penyusunan rancangan perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ( Tanggal 27 Februari 2017)
- b. Rapat kerja dengan DPRD Kota Bogor tentang rencana perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 - 2019 ( Tanggal 29 Maret 2017)
- c. Pertemuan antara Bapak Walikota Bogor dengan seluruh Kepala perangkat Daerah dengan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang di laksanakan di Kementrian PANRB membahas beberapa rekomendeasi KemenPANRB terkait penilaian akuntabilitas kinerja dimana salah satunya adalah terkait dengan revisi dan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini terkait dengan perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA perangkat daerah yang akan menjadi pedoman terhadap perencanaan tahunannya (RKPD dan Renja Perangkat Daerah). ( Tanggal 20 April 2017)
- d. FGD Rancangan Perubahan RPJMD ( Tanggal 17 – 19 Mei 2017)
- e. FGD II Rancangan Perubahan RPJMD ( Tanggal 20 – 23 Mei 2017)
- f. Expose Renstra Perangkat daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Bappeda yang dihadiri oleh tim pembimbing dari Kementrian PANRB ( Bapak Devi Anantha SH, Bapak Suryo Hidayat SH, Bapak Arief Tri Hariyanto SH, LLM, dan Bapak Akhmad Hasmi, Ak(Tanggal 2 Juni 2017 )
- g. Expose Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumkim, Dinas PUPR, Bapenda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dihadiri oleh tim pembimbing dari Kementrian PANRB ( Bapak Devi Anantha SH,dan Bapak Suryo Hidayat SH,) ( Tanggal 21 Juli 2017)
- h. Finalisasi rancangan perubahan RPJMD sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan Daerah tentang perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019. Agenda kegiatan meliputi penyampaian arahan Bapak Sekretaris Daerah Kota Bogor sekaligus evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Bogor sampai tahun ke- 3 pelaksanaan RPJMD 2015 – 2019, dilanjutkan dengan pemaparan Rancangan Perubahan RPJMD oleh Kepala Basppeda, Arahan Bapak Walikota Bogor tentang arah kebijakan



pembangunan Daerah Kota bogor 2015 – 2019 dan arahan dari Kementrian PAN RB terkait evaluasi serta penyelarasan kinerja Pembangunan Daerah serta diakhiri dengan forum diskusi untuk penyempurnaan rancangan perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019. ( Tanggal 31 Agustus 2017).

- i. Rapat kerja dengan Balegda DPRD Kota Bogor. Hasil rapat kerja Perda Revisi RPJMD akan masuk pada masa sidang ke dua,. Tetapi masih memerlukan bahan lanjutan. Bappeda agar segera menyampaikan draft Revisi RPJMD berikut naskah akademiknya. ( Tanggal 20 September 2017)
- j. Saat Bappeda menyampaikan Draft Revisi RPJMD dengan naskah akademik ke DPRD Kota Bogor, turun Permendagri No.86 /2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.sebagai pengganti Permendagri No.54 /Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada pasal 342 ayat 2 berbunyi :

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila :

- a) Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 tahun; dan
  - b) Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 2 tahun
- k. Untuk mengakomodir semua yang melatar belakangi pembuatan revisi RPJMD, setelah berkonsultasi dengan KemenPANRB, Kemendagri dan Bappeda Provinsi Jawa barat serta koordinasi dengan bagian hukum setdakot Bogor, maka di buatlah Keputusan Wali Kota Bogor No. 050.45-304 Tahun 2017 tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bogor ( yang berisi tentang Penetapan rencana kinerja tujuan, Penetapan rencana kinerja sasaran, strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran dan penetapan rencana kinerja program sama dengan isi pada Bab V, VI, VII dan VIII pada draft Revisi RPJMD



Hasil dari kegiatan revisi RPJMD, sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah dokumen Keputusan Wali Kota Bogor No. 050.45-304 Tahun 2017 tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bogor yang berisi :

- a) Penetapan rencana kinerja tujuan
- b) Penetapan rencana kinerja sasaran,
- c) Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran
- d) Penetapan rencana kinerja program

### **13. Penyusunan Profil Perekonomian Kota Bogor**

Kegiatan inidengan anggaran sebesar Rp.18.539.053,- dan realisasi sebesar Rp.17.199.053,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi tentang gambaran kondisi ekonomi makro Kota Bogor
- 2) Penggandaan dokumen hasil publikasi BPS Kota Bogor Buku Inflasi Kota Bogor, Buku PDRB Kota Bogor, Buku IPM Kota Bogor
- 3) Secara umum program dan kegiatan lingkup bidang ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan target dan capaian kerja yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Namun ada juga yang dilaksanakan tapi tidak mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan seperti pada program pembinaan penempatan transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja, dimana indikator RPJM berupa jumlah KK yang ikut Transmigrasi tidak tercapai, karena tahun ini Kota Bogor tidak mendapatkan jatah alokasi transmigrasi. Sosialisasi yang dilaksanakan pun tidak berhasil menjangkau jumlah calon transmigran. Melihat hasil tersebut, untuk tahun berikutnya, sosialisasi tetap diadakan, namun kegiatan peninjauan dan kegiatan monitoring ke lokasi transmigran ditiadakan.
- 4) Pada Dinas Ketahanan Pangan, Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan yang semulanya dialokasikan untuk raskin, sebagian besar dananya dikembalikan seiring dengan perubahannya menjadi Rastra
- 5) Perlu Pembinaan terkait balai benih ikan yang ada di Kelurahan Kencana, karena kondisi lingkungan alam yang kurang mendukung keberlangsungan balai benih ikan di kawasan tersebut. Perlu peningkatan

peran Terminal agribisnis dan, sub terminal agribisnis agar berfungsi secara optimal. Dan juga ditahun tahun berikutnya perlu disusun kebijakan pemanfaatan lahan yang ada di Terminal Agribisnis agar lebih berdaya guna secara ekonomi dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :Publikasi BPS Kota Bogor

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

Kerjasama Penyusunan Profil Ekonomi dengan BPS Kota Bogor tidak jadi, karena sudah menjadi tugas dari BPS dalam penyusunan yang mencakup IPM,PDRB dan Inflasi.

## **F. PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

### **1. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan pembangunan tahun 2017 dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dengan mengukur capaian, keluaran, hasil dan dampak kegiatan yang telah direncanakan.Kegiatan ini

Kegiatan diawali dengan persiapan pembentukan Tim yang ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor Tahun 2017 tentang Tim monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan, dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing bidang pada Bappeda Kota Bogor. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.62.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.59.174.136,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lingkup Bidang Pemerintahan

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Lingkup Bidang Pemerintahan

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Belum adanya standar format laporan dari kelurahan Ke Kecamatan Se-Kota Bogor.
- 2) Belum tersedianya Kolom Rencana Realisasi target pertriwulan sehingga kesulitan dalam melakukan evaluasi

## **2. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya**

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.72.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.64.400.142,-. Bahan kebijakan dan perencanaan ini diperoleh melalui pelaksanaan monitoring dan sekaligus evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tersebar di OPD yang berkaitan dengan bidang sosial budaya.

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan OPD lingkup sosial budaya
- 2) Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya monitoring dan evaluasi lingkup sosial budaya
- 2) Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi

## **3. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi dan Litbang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan di lingkup bidang ekonomi, dan untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan di tiap SKPD di lingkup Bidang Ekonomi pada tahun Anggaran 2017. Dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi Rp.84.302.772,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Adanya gambaran tentang kegiatan yang dilakukan oleh OPD lingkup bidang ekonomi
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan OPD lingkup bidang ekonomi: Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi kreatif Kota Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Dinas Pertanian Kota

Bogor, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bogor, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor, Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor

- 3) Memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ada di OPD lingkup bidang ekonomi, yang mengacu pada RPJMD dalam target dan rencana indikasi programnya. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil laporan per triwulan seluruh kegiatan dalam lingkup bidang ekonomi dengan gambaran umum hasil monitoring sebagai berikut:.
- 4) Perlunya MOU kesepakatan dan ketentuan dalam penyaluran tenaga kerja dan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
- 5) Itulah sekilas gambaran mengenai hasil monev bidang ekonomi dan litbang yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan ditahun-tahun berikutnya.

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :Dokumen hasil monev lingkup bidang ekonomi dan litbang

#### **4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**

Kegiatan dengan anggaran Rp 170.000.000 dan realisasi Rp 155.491.975, Pengendalian merupakan sejumlah tindakan untuk mengikuti pelaksanaan program dan kegiatan serta kemungkinan untuk mengambil tindakan korektif sedini mungkin dalam rangka penyesuaian/perbaikan/pemecahan masalah yang terjadi di lapangan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berdayaguna dan berhasilguna serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian melalui monitoring/pemantauan dan pelaporan dilaksanakan untuk menjamin agar penjabaran kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang dibelanjai melalui APBD dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi selalu berupaya untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana yang sekaligus mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan

(program) dengan ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mendukung atau yang tidak mendukung suatu rencana.

Dasar hukum kegiatan pengendalian dan evaluasi adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Yang kemudian dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian di ubah menjadi Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
- Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
- Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
- Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
- Konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah
- Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

Pembuatan sistem aplikasi e-Evkin (Evaluasi Kinerja) bermaksud untuk:

- Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan
- Melakukan evaluasi dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada
- Memberikan arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Tujuan dari e-Evkin adalah terciptanya aplikasi monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, sehingga menjadi bahan evaluasi kinerja program sesuai RPJMD dan kegiatan selanjutnya.

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh OPD pelaksana kegiatan langsung baik yang bersumber anggaran dari APBD II, APBD I dan APBN.

Kegiatan ini juga melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan dalam pencapaian program pembangunan sesuai RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 secara periodik.

Indikator kinerja program kegiatan ini adalah persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target 93% dan persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target 93% . Adapun capaian s/d Tahun 2017 adalah 90%

Output dari kegiatan ini :

- 1) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester II Tahun Anggaran 2017 (sebanyak 40 Buku)
- 2) Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Sosialisasi Hasil kinerja Perangkat Daerah
- 4) Aplikasi e-Evkin (Evaluasi Kinerja)



## **5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Fisik dan Sarpras Kota secara swakelola guna mengsinkronisasi dan koordinasi terhadap setiap kegiatan SKPD Lingkup Bidang Fisik

Tujuan kegiatan ini memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan di Tahun pelaksanaan, baik pekerjaan fisik dan perencanaan yang terpadu. Dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi Rp.149.879.700,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi perencanaan dan Pelaksanaan lingkup bidang fisik TA. 2017, antarlain :Dinas PUPR, Dinas DLH, Dinas Perumkim, Dinas Dishub
- 2) Perencanaan DAK Tahun 2018
- 3) Perencanaan Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (RKPD online)
- 4) Usulan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Buku Monev Bid. Fisik TA.2017(Matriks Progress pekerjaan per Triwulan)Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Minim nya data dasar dari OPD teknis berupa data pelaksanaan pekerjaan
- 2) Belum siapnya OPD dalam memenuhi Prasyarat teknis dan administrasi dalam pengajuan DAK dan Bantuan Keuangan

## **G. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI**

### **1. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK)**

Merujuk pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan, data pembangunan dibagi menjadi 2 yakni Data Spasial dan Data Aspasial. Data Spasial terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Sedangkan Data Aspasial terbagi menjadi Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus. Cara memperoleh Statistik Sektoraldan Statistik khusus, adalah dari data primer yang diolah dari monitoring dan evaluasi ataupun dari data sekunder hasilpendataanBadanPusatStatistik.

Dasar Hukum SIMPATIK adalah mengacu pada lampiran I Permendagri No 54 / Tahun 2010. Dalam Permendagri tersebut ada 26 urusan wajib daerah, pengelolaan SIMPATIK disesuaikan berdasarkan pemilihan jenis data pada 24 urusan, 2 urusan yang tidak masuk adalah Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik. Dengan anggaran sebesar Rp.115.350.000,- dan realisasi sebesar Rp.105.898.085,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Laporan Semester 1 dan 2 SIMPATIK 2017
- 2) 3 kali Pelaksanaan Rapat dalam tahun 2017, dalam rangka penguatan TIM
- 3) Integrasi 9484 data (melebihi target pada akhir tahun 2019 di 500 data baru, yakni 3415 dan 600 data indikator kinerja

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Mengintegrasikan data yang terdapat dalam Aplikasi Data SIMPATIK 2014-2016 bersama dengan edatabase SIPD 2017, pada sub elemen, sub sub elemen dan sub sub sub elemen data SIMPATIK 2014-2016 sejumlah 6069 pada tanya 24 urusan pemerintahan dengan sub elemen, sub sub elemen dan sub sub sub elemen data database SIPD 2017 sejumlah 3415, dan terdapat 102 data (3%) yang sama. SIMPATIK 2017 memiliki irisan keduanya menjadikan 9484 data (big data) ditambahkan dengan keseluruhan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program sejumlah 600 data indikator.
- 2) Mendukung nawacita Satu Data Indonesia atau issue pembangunan data nasional dalam RanPERPRES tentang Satu Data Indonesia (akan informasikan lanjut), dimana Ruang Lingkup RanPERPRES adalah mengatur (1) Kelembagaan Data, (2) Definisi Data, (3) pengaturan WALIDATA Kota dan WALIDATA Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sebagai PORTAL data (pintu keluar masuk data pada KAB/KOTA) sekaligus bertanggungjawab atas Keakurasian Data Sektor masing-masing PD. Penyiapkan transisi pengelolaan SIPD dalam bentuk komunikasi bersama dan bersurat dinas. Dinas KOMINFOSTANDI yang sebagaimana UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2017 dilengkapi Informasi Hasil RakorNAS (cq OTDA Kemendagri) bahwa Pengelolaan SIPD 2018 adalah menunjuk DISKOMINFOSTANDI sebagai Perangkat Daerah pengampu urusan Statistik. Bappeda menyiapkan transisi dalam upaya menjamin



keberlangsungan program dan telah menyusun surat kepada BANGDA Kemendagri perihal INTEGRASI data SIMPATIK kepada Aplikasi SIPD guna mengimplementasikan “one single entry data”

## **2. Pengelolaan WEBSITE**

Kegiatan ini tidak dianggarkan, tetapi tetap dilaksanakan

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) 100% mendukung memberikan informasi dalam bentuk ;
- 2) 8 Info Penelitian
- 3) 2 Slideshow
- 4) 1 Ticker Berita
- 5) 2 Slider Tabs
- 6) 22 Berita (119 Berita Sukses Unggah, dan 3 Tidak Terunggah)

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pada bab VIII RPJMD atau indikator OPD yang menyediakan informasi publik sesuai undang undang tentang keterbukaan informasi publik. Program dalam urusan komunikasi dan informatika ini sekaligus mendukung sasaran pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada bab VII RPJMD.
- 2) Pada Tujuan 1.1 yakni meningkatkan implementasi egovernment dalam misi I Menjadikan bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus mendukung Sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dengan indikator OPD yang menyediakan informasi publik sesuai KIP pada Tujuan 5.1 mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada Misi 5 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

## **3. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)**

Kegiatan dengan anggaran Rp 250.000.000 dan realisasi Rp 235.626.550, Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan proses perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di kelola secara transparan.

Tujuan dari kegiatan ini untuk membuat sistem informasi guna menunjang implementasi system pemerintahan yang baik (good Governmance). Sistem yang dibangun adalah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan penganggaran dan monitoring evaluasi hasil perencanaan pembangunan berbasis web atau SIMR@L atau e-Planing.

Sasaran SIMR@L atau e-Planing ini adalah seluruh OPD Kota Bogor dalam proses perencanaan kegiatan. SIMR@L atau e-Planing dikembangkan untuk membantu proses pendataan pada setiap tahapan perencanaan serta pengelolaannya yang semula dikerjakan secara manual beralih ke suatu proses yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan suatu output dan sistem pendataan yang lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan ini mensosialisasikan dan memberikan pelatihan tentang pengoperasian Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planing) kepada para operator di masing-masing OPD serta pemeliharaan sistem serta pemuktahiran aplikasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung misi 1 yaitu menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi yang bermaktub dalam RPJMD Kota Bogor. Target indikator program kegiatan ini adalah tingkat ketersediaan dan validasi data/informasi untuk perencanaan (%), pada tahun 2017 adalah 40% dan pencapaian tahun 2017 adalah 40% jadi pencapaian terhadap target sudah 100%.

Output pelaksanaan ini adalah :

- 1) Terselenggaranya pelatihan bagi operator SIMR@I e-Planing sebanyak 100 orang
- 2) Tersediannya dokumen hasil pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan sebanyak 5 buku.



- 3) Terpeliharanya 1 paket system perencanaan pembangunan daerah
- 4) Pemutahiran sistem perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 paket aplikasi dengan melakukan penambahan modul dalam system.

#### **4. Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor**

Kegiatan ini dengan anggaran Rp 92.440.000 dan realisasi Rp 80.030.292, Data pokok perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan bersifat top down atau perintah undang undang yang dilaksanakan sejak tahun 2014 oleh pemerintah kota Bogor yakni diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Adapun output kegiatan ini sebagai berikut:

- 1) 120 buku Bogor Dalam Angka 2017 berisikan data Bogor dalam Angka 2016
- 2) 1 laporan semester 1 dan 2 SIPD 2017
- 3) 1 Kali keikutsertaan aktif dalam Rakorna data di Jakarta
- 4) 2 Kali keikutsertaan aktif dalam Rakorprov Jawa Barat di Bandung
- 5) 3 Kali Pelaksanaan rapat dalam Tahun 2017 dalam rangka penguatan Tim
- 6) 7 Perangkat Daerah Kota Bogor yang dijadikan bagian roadshow sebagai bagian dari pengembangan konsep TUTOR of TUTOR

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Hubungan kegiatan terhadap kebijakan operasional (program) dan kebijakan pembangunan daerah (visi misi tujuan dan sasaran)
- 2) Kegiatan Data Pokok Perencanaan Pembangunan merupakan aksi tahunan dari kebijakan operasional program pengembangan data/statistikdaerah mendukung indikator 40 % target tahun 2016
- 3) Pada bab VIII RPJMD Program dalam urusan statistik ini sekaligus mendukung sasaran pembangunan daerah tersedianya baseline data yang kuat,akurat dan mutakhir bab VII RPJMD
- 4) Pada tujuan 1.3 yakni mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas dalam misi I menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi.

Permasalahan kegiatan ini adalah :



- 1) Masih banyak perbedaan antara elemen data pusat dengan yang tersedia dan menjadi kebutuhan daerah, sehingga banyak data yang tidak jelas
- 2) Kurangnya sosialisasi/tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk memback up data di aplikasi lama sebelum menggunakan sistem yang baru, sehingga menyebabkan data yang telah diinputkan menggunakan aplikasi yang lama tidak tersimpan
- 3) Data SIPD hanya bisa dilihat oleh pengguna yang mempunyai hak akses. Pengguna umum yang membutuhkan data tidak bisa melihat data SIPD
- 4) Setiap pembaruan sistem selalu di ikuti dengan perubahan elemen data,hal ini membuat kesulitan dalam menyajikan timeseries data
- 5) Kewenangan penyusunan dan penerbitan data(payung hukum) belum jelas misal data penduduk dan data sektoral lainnya di unput oleh perangkat daerah/instansi lainnya.
- 6) Validasi data kurang kuat karena masih ada keraguan perbedaan definisi oprasional data dimaksud
- 7) Ketertinggalan data masih terjadi bukan data riil per semester
- 8) Proses pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan koordinasi yang berkesinambungan
- 9) Satuan data tidak sama dengan satuan yang tersedia di perangkat daerah sehingga memakan waktu lama untuk mengisi data yang valid
- 10) Tidak semua elemen data dalam SIPD dat terisi karena banyak dat dilapangan tidak atau belum dilakuan survey atau pendataan belum tersedia
- 11) Adanya penyempurnaan data dengan penambahan elemen data yang terlalu rinci

Upaya Bappeda Kota Bogor : Mengintergrasikan data yang terdapat dalam aplikasi data Simpatik 2014-2016 bersama dengan database SIPD 2017, pada sub elemen, sub-sub eleven dan data Simpatik 2014-2016 sejumlah 6069 elemen data pada 24 urusan pemerintahan dengan sub sub eleven dan database SIPD 2017 sejumlah 3415, dan terdapat 102 data (3%) yang sama. Simpatik 2017 memiliki irisan keduanya menjadi 9484 data (big data) ditambahkan dengan keseluruhan indikator kinerja tujuan, sasaran dan program sjumlah 600 data indikator

## H. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

### 1. Penguatan Kota Sehat

Pembinaan Forum Kota Sehat merupakan salah satu kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Tahun Anggaran 2016, Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terwujudnya kota Bogor sebagai kota sehat. Dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kegiatan yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 No. 1138/menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota.

Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota sehat memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar serta berkelanjutan. Proses mewujudkan kota sehat melibatkan komitmen Pemerintah, penguatan kelembagaan dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat kota Bogor. Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat (yang terdiri dari OPD Kota Bogor) dan Forum Kota Sehat (unsur-unsur perwakilan masyarakat Kota Bogor) dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 050.45-287 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat dan Forum Kota Sehat Kota Bogor yang bertujuan mengsinergikan arah pencapaian kota Bogor sebagai kota sehat. Dengan Anggaran sebesar Rp.276.500.000 dan realisasi sebesar Rp.265.638.400,- Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tercapainya tatanan kota sehat 4 tatanan
- 2) Workshop kota sehat 2 kegiatan 100 orang
- 3) Workshop komdalansia 1 kegiatan 50 orang
- 4) Workshop pembangunan keluarga 1 kegiatan 50 orang
- 5) Kajian model pembangunan wilayah ramah keluarga
- 6) Kajian Pemberdayaan masyarakat

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tercapainya target swatisaba wiwerda, yaitu Kota Sehat yang mencakup 4 tatanan (kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, kehidupan

masyarakat yang sehat dan mandiri, kehidupan sosial yang sehat, kawasan pariwisata

- 2) Workshop I : Persiapan untuk menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan kota sehat.
- 3) Workshop II : Mengevaluasi kegiatan verifikasi dokumen kota sehat oleh Provinsi Jawa Barat serta terkoordinasinya program kerja forum kota sehat dengan target dan sasaran yang jelas
- 4) Terevaluasinya program lansia semester I tahun anggaran 2017 serta menentukan rencana program lansia ke depannya
- 5) Tersosialisasinya hasil kajian model pembangunan wilayah ramah keluarga di Kota Bogor, serta sosialisasi sekolah ibu kepada OPD di Kota Bogor
- 6) Tersedianya dokumen kajian pemodelan wilayah ramah keluarga yang melingkupi lokasi khusus untuk pilot projek
- 7) Tersedianya Kajian pemberdayaan masyarakat Kota Bogor dalam upaya meningkatkan kemampuan kompetensi, kreatifitas dan daya saing sehingga terbentuk sumber daya manusia/masyarakat yang mandiri

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Guna mempercepat tercapainya Bogor Kota Sehat dengan 7 tatanan, koordinasi antara tim pembina forum kota sehat yang terdiri dari OPD-OPD dengan forum kota sehat perlu lebih ditingkatkan lagi, dalam bentuk pertemuan yang membahas program kerja terkait kota sehat yang merupakan kolaborasi lintas sektor
- 2) Perlu ada terobosan, inovasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh komdalansia, selain monitoring terhadap posbindu

## **2. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bahan evaluasi kinerja percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan anggaran sebesar Rp.84.405.000,- dan realisasi sebesar Rp.80.820.915,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :Workshop TKPK Kota Bogor

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah melalui sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan melalui kelompok kerja penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan langsung ke keluarga, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi keluarga dan penanggulangan kemiskinan berbasis usaha ekonomi kecil dan menengah.
- 2) Mendukung kerja sama dengan World Bank terkait dengan bantuan yang diberikan berupa pembangunan sebuah aplikasi yang menggunakan data-data terkait kemiskinan di tingkat Kota Bogor untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan statistik dalam tampilan yang sederhana sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat (Sub National Poverty Analysis atau SNaPA).

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

Belum optimalnya peran masing-masing Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor.

### **3. Pro Poor Planing and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (banprov 2017)**

Kegiatan ini merupakan bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia di Kota Bogor dan untuk mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visinya yaitu “Terwujudnya Lansia Jawa Barat Yang Mandiri, Produktif dan Menjadi Tauladan Generasi Mendatang”. Keluaran dari kegiatan ini yaitu terdatanya penduduk lansia kota Bogor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia kota Bogor. Dengan anggaran sebesar Rp.750.000.000,-dan realisasi sebesar Rp.640.019.538,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :





- 1) Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPKD Kota Bogor
- 2) Terlaksananya Bimbingan Teknis P3BM
- 3) Updating Data Kemiskinan
- 4) Bintek Input dan Verifikasi Data Km 0 Pro Poor
- 5) Dokumen Kajian model penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat
- 6) Terlaksananya Rapat Koordinasi Provinsi Dan Kabupaten/Kota Terkait Dengan Penguatan Kerangka Pengarusutaman Gender
- 7) Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Melalui Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tercapainya Penguatan Koordinasi TKPK Kota Bogor dalam mengevaluasi dan memotoring program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Bogor baik yang bersumber dari Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor maupun masyarakat kota Bogor sendiri.
- 2) Pemutakhiran Data Kemiskinan yaitu Basis Data Terpadu Tahun 2015 pada aplikasi KM 0 Pro Poor BDT 2015 berupa penambahan data foto-foto kepala Rumah Tangga Sasaran, Rumah Tampak Depan dan Samping, Jamban, Dapur dan Aset (Apabila Ada), penambahan titik koordinat rumah, dan pemutakhiran data melalui 37 variabel dalam kuesioner. Pemutakhiran ini dilakukan terhadap 29.819 Rumah Tangga Sasaran yang berada pada masyarakat dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bogor (Desil 1).
- 3) Pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui diseminasi data-data gender kepada para Kepala Perangkat Daerah Perencanaan yang ditindaklanjuti dengan pelatihan Focal Points pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menyusun Analisis Kerangka Pengarusutamaan Gender yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan
- 4) terpilih baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018.

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

Penggunaan Aplikasi dalam menambahkan data-data Kepala Rumah Tangga Sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga penggunaanya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menguasai aplikasi. Termasuk syarat-syarat teknis terkait operasional aplikasi seperti kekuatan jaringan komunikasi dan server dan lain-lain.



## **I. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN**

### **1. Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kab/Kota (banprov 2017)**

Kegiatan ini di biyai APBD 1 dari bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasinya Rp.63.170.491, Hasil kegiatan/output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi program csr di Kota Bogor (dengan narasumber dari tim CSR Bappeda Provinsi Jawa Barat)
- 2) Rapat Koordinasi CSR di Kota Bogor Bogor (dengan narasumber dari tim CSR Bappeda Provinsi Jawa Barat)
- 3) Database CSR/TJSLP, terdiri dari 70 perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang terdaftar sebagai perusahaan di Kota Bogor.
- 4) Laporan Rencana Program dan Kegiatan CSR/TJSLP, berupa 264 usulan kegiatan dari perangkat daerah dengan nilai sebesar Rp. 67.854.328.550
- 5) Peraturan Walikota Bogor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

## **J. Program Perencanaan Tata Ruang**

### **1. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor dengan maksud untuk melaksanakan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031. Tujuan kegiatan ini adalah menilai kinerja RTRW Kota Bogor sebagai dasar untuk dilakukannya revisi RTRW. Peninjauan kembali ini merupakan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah



No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa RTRW dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Pertimbangan peninjauan kembali RTRW didasarkan atas berkembangnya dinamika pembangunan Kota Bogor selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak disusunnya RTRW. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dan realisasi Rp. 662.408.866,- Output kegiatan ini adalah : Dokumen Teknis dan Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor 2011-2031, yang berisi revisi atas RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 Outcome kegiatan ini adalah : Tererevisinya RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

## **K. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

### **1. Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi Penataan Ruang ini adalah untuk memfasilitasi koordinasi penataan ruang di Kota Bogor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bogor yang beranggotakan pimpinan daerah dan OPD terkait penataan ruang di Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan berupa rapat koordinasi yang membahas masalah perencanaan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang yang menghasilkan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan. Dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan realisasi Rp. 226.006.728,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Prosiding hasil rapat koordinasi penataan ruang, yang berisi kasus-kasus tata ruang yang telah dibahas dan diputuskan
- 2) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Bogor



Outcome kegiatan ini sebagai berikut : terselesaikannya permasalahan terkait Penataan Ruang

## 2. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Ruang (SIP3R)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. SIP3R ini merupakan alat bantu mengintegrasikan tugas antar PD terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, pengawasan dan penindakan.

Tujuan untuk kegiatan ini adalah mengelola dan memelihara baik perangkat lunak maupun perangkat keras SIP3R. Pada kegiatan ini dilaksanakan pemeliharaan server, testing kehandalan koneksi sistem, integrasi dan interoperabilitas SIP3R dengan sistem informasi perijinan SMART BPPTPM dan pelatihan bagi OPD pengguna yakni Bappeda, BPPTPM, Diswabangkim dan Satpol PP. Adapun hasilnya adalah terpeliharanya perangkat lunak dan keras SIP3R, serta terhubungnya SIP3R dengan SMART serta terlatihnya PD pengguna. Dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.192.300.078,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, melalui penguatan interoperabilitas dengan SMART DPMPTSP, Pembuatan dalam platform android.



- 2) Penghargaan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial dari BIG (Bhumandala Award kategori Inovasi Unggulan) untuk SIP3P

Outcome kegiatan ini sebagai berikut : Termanfaatkannya sistem informasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang

## **L. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENATAAN RUANG**

### **1.Sosialisasi Tata Ruang**

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi Rp.141.766.093,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Perencanaan (Pra Desain) Revitalisasi Kawasan Pusaka Suryakencana, yakni berisi rencana penataan Pasar Bogor dan Plaza Bogor menjadi gedung parkir dan taman, serta desain koridor jalan pada Kawasan Suryakencana
- 2) Sosialisasi Produk Tata Ruang (Revitalisasi Kawasan Pusaka Suryakencana), yang dilakukan kepada stakeholder terkait kawasan Suryakencana baik pemerintah Kota Bogor.



Outcome kegiatan ini sebagai berikut :Tersosialisasikannya Penataan Ruang Kota Bogor

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.**

Dalam rangka peningkatan dan penyamaan persepsi dalam tingkat kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam menyikapi permasalahan yang kritis dan krusial yang terkait dengan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Saat ini sedang berupaya meningkatkan pelayanan, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan teknis tugas di bidang perencanaan.
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan .
5. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemeritahan daerah di bidang perencanaan.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang paling utama adalah :

- 1) Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- 2) Perencanaan Pembangunan yang holistic, terintegrasi, dan mengarah pada konektivitas secara special dan berkelanjutan.
- 3) Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja.

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkatkan keahlian sumberdaya manusia dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah
- 2) Tingkatkan sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah
- 3) Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana dan sarana
- 4) Terapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah (Pelayanan Publik).

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

Adapun kebijakan nasional dan provinsi yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Kebijakan nasional : anggaran pendidikan 20%, anggaran kesehatan 10%, anggaran sanitasi 2%, penurunan gas emisi rumah kaca 46%, Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), MDGs, kebijakan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) 30%
- b. Kebijakan Provinsi : 10 Common Goals, kegiatan tematik kewilayahan, kegiatan sektoral, Jawa Barat satu data, Sinergitas perencanaan pembangunan Jawa Barat di Kota Bogor

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi Bappeda Kota Bogor “*Mewujudkan perencanaan yang berkelanjutan secara partisipatif, professional, dan bertanggungjawab*” dan misi Bappeda Kota Bogor,

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

maka tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda dari penjabaran misi, adalah:

**MISI 1** Tujuan :

*terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.*

Sasaran :

1. *Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.*
2. *Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.*

**MISI 2** Tujuan:

*Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yg berpihak kepada masyarakat*

Sasaran :

1. *Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.*

**MISI 3** Tujuan :

*Terwujudnya perencanaan pembanguna daerah yang berbasis kinerja.*



Sasaran :

1. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah.*

### 3.3 Program dan Kegiatan Bappeda

Upaya untuk menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas dari tahun ke tahun telah ditempuh oleh Bappeda Kota Bogor, melibatkan seluruh *stakeholders* kota untuk menciptakan persamaan persepsi semua pihak yang terkait serta menggali kebutuhan warga dalam proses pembangunan sekaligus membuka partisipasi publik melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang juga telah menjadi agenda tetap Bappeda Kota Bogor.

Berdasarkan hasil penjaringan pada Forum konsultasi publik berupa Musrenbang ditambah dengan beberapa kebijakan Bappeda, telah menghasilkan beberapa prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan ;
  - Pengelolaan Rumah Tangga OPD
2. **Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan ;
  - Pengadaan Inventaris Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
3. **Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - Penyusunan Perencanaan & Pelaporan OPD
4. **Program Perencanaan Penataan Ruang**, dengan kegiatan :
  - Sosialisasi Tata Ruang
5. **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**, dengan kegiatan :
  - Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan dan Permukiman
  - Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM
6. **Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota**, dengan kegiatan :
  - Review Masterplan Transportasi
  - Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota



7. **Program PenyusunanPerencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan :
  - Perencanaan Umum
  - Penyusuna RPJMD 2020-2025
  - Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pembangunan
8. **Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**, dengan kegiatan :
  - Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
  - Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor
9. **Program Pengembangan Data dan Informasi**, dengan kegiatan :
  - Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah
10. **Program Perencanaan Sosial Budaya**,dengan kegiatan :
  - Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan
  - Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya
  - Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan
11. **Program Penelitian Pengembangan**, dengan kegiatan :
  - Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019
12. **Program Kerjasama Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan :
  - Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menerangkan bahwa OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2019, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda pada Tahun 2019 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bappeda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.